

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Salah satunya adalah anggaran. Anggaran diperlukan untuk mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, anggaran biasanya berisi estimasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam suatu periode. Selain itu, anggaran juga berisikan estimasi kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo, 2018:76). Struktur Anggaran pendapatan belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diantaranya pertama ada pendapatan daerah, yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Yang kedua ada belanja daerah yang diantaranya berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan wajib, berdasarkan

klasifikasi belanja menurut urusan pilihan, dan berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja, dan yang ketiga ada pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah daerah harus mengelola sistem penganggaran yang efisien dan efektif mengingat desentralisasi pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang dapat membangun daerah untuk memenuhi tujuannya. Anggaran di sektor publik berbeda dengan anggaran di sektor swasta, yang terutama berfokus pada hasil atau keuntungan. Di sektor swasta anggaran merupakan sesuatu yang dirahasiakan, namun tidak demikian di sektor publik, di mana anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Sehingga publik akan dapat menilai dan dapat dijadikan untuk bahan perbaikan untuk masa yang akan datang. Karena dengan adanya transparansi ini pemerintah pusat dapat membuat perbaikan dalam sistem pengadministrasian maupun dalam anggaran.

Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD (Herlin et al., 2021:127). Anggaran pendapatan dan belanja daerah dibuat semaksimal mungkin untuk digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dalam merumuskan suatu kebijakan, baik alokasi sumber daya maupun distribusi yang harus dikembalikan kepada seluruh masyarakat. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ini dicatatnya semua transaksi baik itu

pendapatan daerah maupun semua keluaran (belanja) daerah. Anggaran dapat dengan mudah dimanipulasi jika tidak direncanakan dengan cara yang terukur. Oleh karena itu, harus ada transparansi yang jelas tentang kemana uang dan pengeluaran tersebut dibelanjakan dalam penganggaran pemerintah, khususnya penganggaran pemerintah daerah.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana pengertian dari belanja yaitu semua pengeluaran yang berasal dari kas daerah juga yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun periode yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah (Winartuti, 2021:71). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 32 ayat (2) (Amin, 2019:22-24), klasifikasi belanja pemerintah daerah mencakup: belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yang penganggarnya terkait dengan program dan kegiatan. Jenis dari belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang penganggarnya tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Jenis belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Berikut ini peneliti menyajikan rincian anggaran belanja langsung pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada kantor Kecamatan Cileunyi tahun anggaran 2019-2021.

Tabel 1.1

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja di Kecamatan Cileunyi Tahun 2019 – 2021 Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Selisih
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2019	18.100.000	14.230.000	78,62%	3.870.000
	2020	20.000.000	19.800.022	99%	199.978
Lainnya	2021	6.000.000	3.360.000	56%	2.640.000

Sumber : LKIP Kecamatan Cileunyi (diolah peneliti, 2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam belanja langsung pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya mengalami penurunan dalam serapan anggarannya dimana pada tahun 2019 sebesar 78,62% yang terserap, pada tahun 2020 mencapai 99% sedangkan pada tahun 2021 hanya 56%. Dimana anggaran pada tahun 2021 ini sebesar Rp. 6,000,000.00 dengan realisasi sekitar Rp. 3,360,000.00 dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 2,640,000.00. sedangkan kondisi di kantor kecamatan Cileunyi tersebut terdapat banyak peralatan yang perlu untuk diperbaiki.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti di kantor Kecamatan Cileunyi, masih terdapat masalah terkait dengan realisasi anggaran khususnya pada anggaran belanja langsung pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya di Kecamatan Cileunyi. Masalah yang pertama yaitu adanya perbedaan antara target anggaran dengan realisasi anggaran yang cukup besar. Serta masalah yang kedua dalam rincian anggaran belanja langsung dimana pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang realisasi anggarannya yaitu 56%, sedangkan yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Dimana realisasi anggaran yang harus dicapai yaitu 95% karena apabila realisasi anggaran tersebut tidak tercapai maka instansi/lembaga tersebut akan dikenakan sanksi.

Penyerapan anggaran tersebut akan menghasilkan dua hal, pertama dapat menunjukkan adanya efisiensi anggaran, kedua jika terdapat selisih antara target anggaran dengan realisasi maka terjadinya kekurangan dalam hal perencanaan anggaran yang tidak sesuai atau anggaran tidak terserap karena ada program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak berhasil. Dimana dari uraian permasalahan diatas terlihat pada rincian anggaran dan realisasi belanja langsung di kantor Kecamatan Cileunyi yang terdapat silpa yang cukup besar, sedangkan pada sarana dan peralatan kantor, seperti kursi, antrian loket pendaftaran serta pada mesin anjungan di Kecamatan yang perlu untuk dilakukan perbaikan maupun di ganti.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas yaitu adanya perbedaan antara target anggaran dengan realisasi anggaran, serta dalam rincian anggaran belanja langsung pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang realisasi anggarannya hanya 56%. Dimana peneliti menganggap penting untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang terdapat di Kecamatan Cileunyi, supaya dapat diketahui penyebab permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Realisasi Belanja Langsung Pada Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2021”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dijelaskan tersebut maka peneliti menyimpulkan identifikasi permasalahan yaitu :

1. Adanya perbedaan antara target anggaran dengan realisasi anggaran pada belanja langsung di Kecamatan Cileunyi tahun 2021.
2. Adanya sisa anggaran yang tidak terealisasi terhadap kebutuhan di Kecamatan Cileunyi tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis varians belanja pada Kecamatan Cileunyi ?
2. Bagaimana analisis pertumbuhan belanja pada Kecamatan Cileunyi?
3. Bagaimana analisis keserasian belanja pada Kecamatan Cileunyi ?
4. Bagaimana rasio efisiensi belanja pada Kecamatan Cileunyi ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis varians belanja pada Kecamatan Cileunyi.
2. Untuk mengetahui analisis pertumbuhan belanja pada Kecamatan Cileunyi.
3. Untuk mengetahui analisis keserasian belanja pada Kecamatan Cileunyi.
4. Untuk mengetahui rasio efisiensi belanja pada Kecamatan Cileunyi.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang administrasi publik dalam mempelajari dan menganalisis anggaran belanja langsung pada kantor Kecamatan Cileunyi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk Peneliti

Untuk memperluas pemahaman kita tentang administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan studi pengelolaan keuangan daerah dalam perealisasi anggaran belanja, untuk lebih menerapkan dan membedakan pengetahuan yang didapat peneliti dengan kenyataan di lokasi penelitian.

b. Untuk Instansi

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi sumber dan masukan dan penilaian khususnya di Kecamatan Cileunyi.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dari penelitian ini dijadikan sebagai dasar untuk penelitian yang akan datang, serta dijadikan sebagai bahan referensi yang lebih mendetail dan terfokus pada topik yang sama.

F. Kerangka Pemikiran

Peneliti membuat kerangka penelitian untuk dapat memudahkan dalam pemecahan masalah sehingga membuat penelitian lebih terarah. Pada pembahasan penelitian yaitu tentang analisis anggaran pendapatan belanja daerah dalam realisasi anggaran belanja langsung pada Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tahun 2021 maka digunakannya teori analisis anggaran dari (Mahmudi, 2019) yang menyatakan berdasarkan informasi pada laporan realisaasi anggaran, kita dapat membuat analisis

anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa : analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja.

Alasan peneliti menggunakan teori analisis anggaran dari (Mahmudi, 2019) yaitu karena sesuai dengan kebutuhan peneliti yang terkait dengan masalah penelitian yaitu adanya perbedaan antara target anggaran dengan realisasi anggaran pada belanja langsung di Kecamatan Cileunyi serta adanya sisa anggaran yang tidak terealisasi terhadap kebutuhan di Kecamatan Cileunyi tahun 2021 yaitu pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang realisasi anggarannya hanya 56%.

Dari permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori dari (Mahmudi, 2019) sehingga dapat melihat bagaimana analisis anggaran khususnya belanja langsung pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan oleh Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Kemudian diharapkan realisasi anggaran belanja yang ditetapkan dapat terealisasi secara optimal. Selain itu dari analisis tersebut dapat diketahui faktor apa saja yang dapat mendorong serta menghambat dari setiap kegiatan yang dijalankan.

Berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema kerangka pemikiran yang menjadi landasan berpikir bagi peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

